

## **PERAN KOMITE SEKOLAH SEBAGAI PENGONTROL DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI GUGUS SD NEGERI LAMBADA KLIENG ACEH BESAR**

**Wirda Emelda, Sulaiman, Rosma Elly.**

### **ABSTRAK**

Untuk meningkatkan mutu pendidikan dibutuhkannya dukungan lapisan orgasi masyarakat yang disalurkan melalui komite sekolah, namun nyatanya komite sekolah hanyalah lambang suatu organisasi saja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam penyelenggaraan pendidikan digugus SD Lambada Klieng Aceh Besar. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam penyelenggaraan pendidikan digugus SD Lambada Klieng Aceh Besar dan faktor penghambat dalam pengontrolan penyelenggaraan pendidikan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek yang akan diwawancarai yaitu 12 orang anggota dewan komite sekolah. Pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan analisis data yaitu mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah dalam melaksanakan perannya sebagai pengontrol belum maksimal baik dalam akuntabilitas maupun tranparansi. Dalam hal transparansi komite sekolah masih belum maksimal terlibat baik dalam (1.)Pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan (2.) Penyusunan rencana pengembangan sekolah (RPS). (3.) Rencana Anggaran pendapatandan belanjasekolah (RAPBS). Begitupun keterlibatan dalam menjalankan perannya sebagai pengontrol akuntabilitas dalam (1.)Kinerjasekolah (2.)Mutusekolah (3.)Sumberdayasekolah (4.)Output Pendidikan.

**Kata Kunci :** Peran Komite, pengontrol

### **Pendahuluan**

Komite sekolah salah satu lembaga yang menjadi wadah peran masyarakat dalam memajukan satuan pendidikan. Namun Setiap sekolah dalam suatu gugus kurang melibatkan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan baik dalam pengawasan terhadap alokasi anggaran maupun pengambilan keputusan disekolah. Komite sekolah hanya lambang dan dalam proses admintrasi sekolah, ketika dibutuhkannya stempel dari dewan komite sekolah untuk legalitas suatu dokumen singkatnya komite sekolah hanya berperan sebagai petugas stempel anggaran. Hal ini terjadi karena komite sekolah dianggap bukanlah organisasi yang didasari oleh pemerintah dimana komite sekolah adalah lembaga yang mandiri, tidak seperti lembaga pemerintah yang memiliki jam

kerja tetap komite sekolah sebagai lembaga mandiri tidak memiliki jam kerja tetap sehingga tentu sulit bagi komite sekolah untuk terlibat dalam melaksanakan salah satu perannya sebagai pengontrol di sekolah. Dari latar belakang masalah, peneliti berminat untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Komite Sekolah Sebagai Pengontrol Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Gugus SD Negeri Lambada Klieng Aceh Besar”**.

Adapun tujuan penelitian ini beialah dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam penyelenggaraan pendidikan di gugus SD Negeri Lambada Klieng Aceh Besar.

Manfaat penelitian ini adalah untuk menjadi referensi dan sumber bacaan bagi peneliti lainnya dan satuan gugus mengenai peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam penyelenggaraan pendidikan di gugus. Dalam otonomi pendidikan komite sekolah ialah lembaga independent yang bertugas menampung dan memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam mengapresiasi perhatiannya terhadap mutu, keteteraan dan ketepatan pelaksanaan pendidikan di satuan lembaga pendidikan.

Lampiran Keputusan menteri pendidikan Nasional tahun 2002 Nomor 044 tentang peran juga fungsi Komite sekolah disebutkan bahwa Peran Komite sekolah sebagai :

1. Advisory Agency ialah pemberi pendapat dalam penerapan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Supporting ialah pendukung dalam segala hal baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Controlling Agency ialah pengontrol baik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator Agency ialah sebagai jembatan penghubung antara pemerintah (Executive) dengan masyarakat di satuan lembaga pendidikan.

Fungsi komite sekolah sebagai :

1. Pemicu timbulnya perhatian dan tanggung jawab masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan yang berkualitas.
2. Partner saling menguntungkan bagi perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industry dan pemerintahan berhubung dengan pelaksanaan proses belajar mengajar yang berkualitas.

3. Memampung dan menyeleksi pendapat, ide/pemikiran , keharusan, dan berbagai kepentingan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan ide , pemikiran, dan saran kepada satuan pendidikan mengenai :
  - a. Kebijakan/keputusan dalam program pendidikan
  - b. Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS)
  - c. Penetapan karakter kinerja satuan pendidikan
  - d. Penetapan ciri-ciri karakteristik tenaga kependidikan
  - e. Hal-hal yang dibutuhkan fasilitas kependidikan; dan
  - f. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan;
5. Mendorong orangtua dan masyarakat ikut serta dalam kegiatan pendidikan sebagai pendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Melakukan penilaian dan pemantauan terhadap keputusan , program, penyelenggaraan serta pengeluaran pendidikan disatuan pendidikan.

Hasil perumusan kesepakatan dari seminar “Optimalkan Peran dan Fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah” tanggal 31 Oktober – 2 November 2012 menyatakan bahwa sebagai pengontrol komite sekolah berperan dalam akuntabilitas serta transparansi kegiatan sekolah.

1. Akuntabilitas
  - a) Kinerja sekolah.
  - b) Mutu sekolah.
  - c) Sumberdaya sekolah.
  - d) Output Pendidikan.
2. Transparansi
  - a) Pelaksanaan program dan kegiatan Pendidikan.
  - b) Penyusunan rencana pengembangan sekolah (RPS), dan.
  - c) Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS).

## **Metode Penelitian**

Dalam pengambilan data dikenakan dengan pendekatan kualitatif disertai jenis penelitian deskriptif kualitatif ,subjek yang digunakan di gugus SD Negeri Lambada Klieng Aceh besar yang didalamnya terdiri dari 6 SD dalam 1 gugus, yaitu SDNLambada Klieng,SDN klieng, SDN Kajhu, SDN Kuta Pasi, SDN Monsinget dan SDN Dayah Rungkum. Teknik untuk mengumpulkan data digunakan dengan tehnik wawancara serta pengumpulan data-data dalam bentuk dokumentasi. Data-data yang diperoleh kemudian diolah dengan Three prosecing yaitu: pengumpulan data, pemaparan data dan menarik hasil akhir dari data yang telah disajikan.

## Hasil Penelitian

Penelitian perihal peran komite sebagai pengontrol penyelenggaraan pendidikan digugus Sekolah Dasar Negeri Lambada Klieng Aceh Besar. meliputi peran komite sekolah sebagai pengontrol penyelenggaraan pendidikan. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan lampiran keputusan menteri pendidikan nasional tahun 2002 undang-undang Nomor 044 tentang peran dan fungsi komite sekolah ialah “pengontrol(Controlling Agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan”.

### 1. Pelaksanaan peran sebagai pengontrol transparansi

Berikut ini komite sekolah berperan sebagai pengontrol dalam transparansi pelaksanaan pendidikan di setiap sekolah dalam satu gugus.

#### a. Pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tidak semua sekolah digugus sering melibatkan komite sekolah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan. Hasil penelitian ini kurang sesuai dengan lampiran II (DUA) keputusan menteri pendidikan nasional nomor 044 undang-undang tanggal 2 April tahun 2002 no 2 yang menjelaskan tentang tujuan pembentukan komite sekolah ialah “menaikkan rasa partisipasi dan meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan proses belajar mengajar disatuan sekolah”.

Penelitian juga menunjukkan bahwa sekolah dalam gugus masih belum maksimal melibatkan komite sekolah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan, dimana jika diadakan rapat tentang pelaksanaan program serta kegiatan pihak sekolah dalam gugus selalu menginformasikan kepada pihak dewan komite namun beberapa sekolah kurang menerima kunjungan dari pihak komite sekolah hal ini disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam dewan komite sekolah dimana pihak dewan komite tidak dapat hadir karena juga memiliki kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.

#### b. Penyusunan rencana pengembangan sekolah (RPS)

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sekolah-sekolah digugus SD lambada Klieng selalu menginformasikan kepada dewan komite tentang pengembangan sekolah yang akan

direncanakan guna terjalinnya kerja sama antara sekolah dengan dewan komite sekolah yang berkegunaan sebagai wadah penjembutan antara pihak sekolah dengan pihak lingkungan sekolah . Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil dari pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa dewan komite sekolah sebagai badan independent yang menyalurkan keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan pencapaian ,keefisienan serta pemerataan pengolahan pendidikan didalam suatu lembaga pendidikan.

Sekolah dalam gugus selalu melakukan rapat minimal setahun sekali dengan komite sekolah untuk membahas tentang dana-dana yang ada disekolah, dan penggunaan dari dana-dana tersebut akan digunakan untuk apa.

c. Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS)

hasil penelitian diketahui bahwa selama peneliti melakukan wawancara dengan setiap perwakilan dewan komite sekolah disetiap sekolah dalam gugus SD Lambada Klieng, komite sekolah tidak selalu dilibatkan dalam RAPBS hasil penelitian ini tidak sesuai dengan lampiran kemendiknas tahun 2002 Nomor 044 undang-undang perihal peran serta kegunaan Komite sekolah yang menyatakan “peran dan fungsi komite adalah mengemukakan pendapat dan opini , saran , dan solusi kepada lembaga pendidikan mengenai rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS)”.

2. Pelaksanaan peran pengontrolan akuntabilitas

Berikut ini peran serta komite ialah sebagai pengontrolan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan di setiap sekolah dalam satu gugus.

a. Kinerja sekolah

Berdasarkan hasil penelitian disetiap SD digugus SD Lambada Klieng diketahui selama peneliti melakukan wawancara, bahwa masih kurang adanya komunikasi antara pihak sekolah dengan komite sehingga hasil penelitian ini tidak sesuai dengan lampiran Kepmendiknas Nomor 044 aturan undang-undang yang dikeluarkan pada 2002 tentang peran dan kegunaan Komite

sekolah yang menyebutkan bahwa keikutsertaan komite sekolah sebagai pengontrol ialah “Memberikan pendapat , opini, dan saran kepada satuan pendidikan mengenai :Karakteristik kinerja satuan pendidikan dan Kkarakteristik tenaga kependidikan”. Hal ini dikarnakan terkadang kepala sekolah di sekolah merasa mampu menangani masalah-masalah yang ada disekolah sehingga tidak menginformasikan kepada pihak komite sekolah.

b. Mutu sekolah

Berdasarkan hasil penelitian digugus SD Lambada Klieng peneliti dapat menyatakan bahwa setiap sekolah dalam gugus masih kurang melibatkan mayarakat dalam meningkatkan mutu sekolah, dimana hal tersebut tidak sesuai seperti lampiran dua (II) keputusan menteri pendidikan nasional tanggal 2 april 2002 undang-undan nomor 044, proses pembentukan komite sekolah dimana disebutkan komite sekolah bertujuan untuk “Menampung dan menyematani aspirasi dan prakarsa lingkungan warga dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan” serta lampiran Kepmendiknas Nomor 044 undang-undang yang dikeluarkan pada 2002. tentang peran dan fungsi Komite sekolah disebutkan bahwa Peran Komite sekolah sebagai “Memotivasi wali murid dan warga untuk ikut serta dalam proses pembelajaran sebahagai mendukung penaikan kualitas dan keserataan proses pembelajaran.”.

c. Sumberdaya sekolah

Dari hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa sekolah dalam gugus masih belum maksimal melibatkan komite sekolah dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada disekolah hal ini dikarenakan sekolah jarang melakukan melakukan kegiatan kegiatan yang membutuhkan peran komite sekolah sebagai pengontrol sumberdaya yang ada disekolah, pihak sekolah cenderung lebih melibatkan anggota sekolah yang berada dalam lingkungan sekolah,untuk menjaga sumberdaya sekolah sehingga hal ini belum sesuai dengan lampiran tentang peran dan fungsi Komite sekolah disebutkan bahwa Peran Komite sekolah ialah “Memberikan ide pemikiran , perhatian , dan pertimbangan kepada satuan lembaga belajar mengajar mengenai : kriteria fasilitas kependidikan”.

d. Output Lulusan sekolah

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sebagai output pendidikan sudah berjalan dengan baik. meski pengontrolan output pendidikan lebih sering melibatkan sekolah namun sekolah selalu menginformasikan kepada komite sekolah dalam rapat akhir tahun tentang keluaran pendidikan baik itu pengeluaran dana dan kelulusan peserta didik dalam setiap sekolah. Hasil penelitian ini sesuai dengan lampiran tentang peran dan fungsi Komite sekolah disebutkan bahwa Peran Komite sekolah ialah “Melakukan penilaian dan pemerhati terhadap keputusan, kegiatan, pelaksanaan, dan lulusan disatuan pengajaran”.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Gugus SD Lambada Klieng Aceh Besar dapat disimpulkan bahwa komite sekolah dalam melaksanakan perannya sebagai pengontrol masih belum maksimal baik dalam transparansi maupun akuntabilitas. Sebagai pengontrol transparansi komite sekolah masih belum maksimal dalam (1.) Pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan (2.) Penyusunan rencana pengembangan sekolah (3.) Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Begitupun keterlibatan dalam perannya mengontrol akuntabilitas sebagai pengontrol (1.) Kinerja sekolah (2.) Mutu sekolah (3.) Sumberdaya sekolah (4.) Output Pendidikan. Simpulan penelitian ini adalah komite sekolah digugus SD Lambada Klieng masih belum berada pada tahapan maksimal dalam melaksanakan perannya sebagai pengontrol penyelenggaraan pendidikan dalam satuan gugus, Adapun SD dalam gugus yang telah menjalankan peran komite sekolah dengan baik ialah SD lambada Klieng dan SD Klieng.

